



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 278 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR *MONITORING* EVALUASI PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE KEMENTERIAN,
UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN SATUAN KERJA PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan pelaporan kinerja oleh Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penunjukkan operator *monitoring* evaluasi pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi tipe Kementerian, Unit Organisasi Eselon I, dan Satuan Kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Operator *Monitoring* Evaluasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Kementerian, Unit Organisasi Eselon I, dan Satuan Kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN OPERATOR *MONITORING* EVALUASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE KEMENTERIAN, UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN SATUAN KERJA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Operator *Monitoring* Evaluasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Kementerian, Unit Organisasi Eselon I, dan Satuan Kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2024

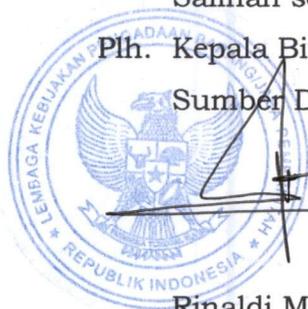
Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
OPERATOR *MONITORING* EVALUASI
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE
KEMENTERIAN, UNIT ORGANISASI
ESELON I, DAN SATUAN KERJA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 278 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 November 2024

SUSUNAN OPERATOR *MONITORING* EVALUASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE KEMENTERIAN, UNIT
ORGANISASI ESELON I, DAN SATUAN KERJA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Edi Kristiyanto 197602021998031001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
2.	Resa Anggriani 198607092010122001 Penata Tingkat I (III/d)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
3.	Biantri Raynasari 198906082014022001 Penata (III/c)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
4.	Verawaty Simorangkir 198609122015022002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
5.	Larasati Aisyah Retno Anjani 199501132019022002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
6.	Budi Setyo Nugroho 199202022022031001 Penata Muda (III/a)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
7.	Milania Pradani 199912312021012001 Pengatur (II/c)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.
8.	Dahat Riswanto 198412202024211001 (IX)	Operator	1. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Kementerian/ Lembaga. 2. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Unit Organisasi Eselon I. 3. Operator <i>Monitoring</i> Evaluasi Satuan Kerja.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN